

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, A. (2017). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. D. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Daulay, I. R. (2006). *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fachrudin, I. (2005). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Mataram: Formula.
- Hadjon, P. M., Djatmiati, T. S., Addink, G., & Berge, J. T. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Indroharto. (1996). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Press (KONpress).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press.

- Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soebechi, I. (2014). *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.
- Tjandra, W. R. (2011). *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Tjandra, W. R. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Filosofi, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiyono. (2013). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Cetakan V*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Aspani, B. (2018). Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *Solusi*, 16(3), 345.

- Asy'Ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4).
- Aziz, M. (2016). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5).
- Bimasakti, M. A. (2019). Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak dalam Sistem Pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(1).
- Hermawan, S. (2021). Kajian Terhadap Tindakan Administrasi pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1).
- Hikmawati, P. (2015). Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali. *Jurnal Info Singkat Hukum*, 7(1).
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex et Scocietatis*, 9(1), 139.
- Mahmud, A. M., & Paradiska, S. P. (2024). Alternatif Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam. *Justice*, 6(1).
- Prahastapa, A. M., Leonard, L. T., & Putrijanti, A. (2017). “Friksi Kewenangan PTUN dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Putrijanti, A., & Leonard, L. T. (2019). Kompetensi Peratun untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang. *Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1).

- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2017). Model Fungsi Pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Mimbar Hukum*, 29(2).
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1).
- Setyono, Y. A. (2019). Tinjauan “Novum” dalam Peninjauan Kembali. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, 49(1).
- Syamsiati, N. (2009). *Legal Standing Pemohon dalam Beracara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Skripsi FH UI.
- Tindi, Z. (2016). Kajian Hukum terhadap Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (Noneksekutabel) Pasca Putusan Pengadilan. *Jurnal Lex Societatis*, 4(1).
- Utama, K. W. (2015). Quo Vadis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3).
- Yulida, D., Utama, K. W., & Nugraha, X. (2022). Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan sebagai Batu Uji terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. *USM Law Review*, 5(1).

Perundang-Undangan & Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 tentang Pihak yang dapat Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara

SEMA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Website dan Artikel

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. *Retrieved from* KBBI VI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan>

Kartika, M. *Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved from* Pejabat TUN Tak Dapat Ajukan PK:

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20143&menu=2,](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20143&menu=2)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Retrieved from* Ibu Rumah Tangga Uji

Norma PK dalam UU PTUN:

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20046&menu+2>

Nofan. *PTUN Surabaya. Retrieved from* Respons Konstitusional PTUN Surabaya

atas Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Badan/Pejabat TUN

Pasca Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024: [https://www.ptun-](https://www.ptun-surabaya.go.id/respons-konstitusional-ptun-surabaya-atas-pembatasan-pengajuan-peninjauan-kembali-oleh-badan-pejabat-tun-pasca-putusan-mk-nomor-24-puu-xxii-2024/)

[surabaya.go.id/respons-konstitusional-ptun-surabaya-atas-pembatasan-](https://www.ptun-surabaya.go.id/respons-konstitusional-ptun-surabaya-atas-pembatasan-pengajuan-peninjauan-kembali-oleh-badan-pejabat-tun-pasca-putusan-mk-nomor-24-puu-xxii-2024/)

[pengajuan-peninjauan-kembali-oleh-badan-pejabat-tun-pasca-putusan-mk-](https://www.ptun-surabaya.go.id/respons-konstitusional-ptun-surabaya-atas-pembatasan-pengajuan-peninjauan-kembali-oleh-badan-pejabat-tun-pasca-putusan-mk-nomor-24-puu-xxii-2024/)

[nomor-24-puu-xxii-2024/](https://www.ptun-surabaya.go.id/respons-konstitusional-ptun-surabaya-atas-pembatasan-pengajuan-peninjauan-kembali-oleh-badan-pejabat-tun-pasca-putusan-mk-nomor-24-puu-xxii-2024/)

PTUN Jayapura. *Retrieved from* Persyaratan Upaya Hukum Peninjauan Kembali:

<https://ptun-jayapura.go.id/persyaratan-upaya-hukum-peninjauan-kembali>

Wawancara

Wawancara bersama Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang,

Bapak Trisoko Sugeng Sulistyono, S.H., M.Hum., pada 06 Desember 2024.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

Jl. Abdulrahman Saleh No. 89 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
Telp./Fax. (024) 7613310/7607413, e-mail: info@ptun-semarang.go.id
Website: www.ptun-semarang.go.id

Nomor : 106³ /KPTUN.W3-TUN2/HM2.1.4/XII/2024 Semarang, 2 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang 50275

Menanggapi Surat Saudara Nomor : 744/UN7.F1/AK/XI/2024 tanggal 19 November 2024, Hal Permohonan Riset/Penelitian. Diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan, mengizinkan pelaksanaan kegiatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, atas nama :

Nama : Arsha Nurul Salwa
NIM : 11000121120083
Program Studi : S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Sugiyanto